

Pancasila Dan Tantangan *Post-Truth* Politics Dalam Demokrasi Indonesia

Ani Sulianti ^{a, 1*}

^a Universitas Panca Marga, Indonesia

¹anisulianti@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:
19-02-2026

Disetujui:
31-05-2026

Kata kunci:

Pancasila
Post-Truth Politics
Demokrasi
Literasi Media Digital

ABSTRAK

Fenomena *post-truth politics* menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia di era digital. Dalam kondisi ini, kebenaran objektif kehilangan pengaruh dalam bentuk opini publik, digantikan oleh emosi, keyakinan pribadi, dan narasi yang sering kali menyesatkan. Dampak dari budaya *post-truth* mencakup meningkatnya disinformasi, polarisasi identitas, penurunan rasionalitas politik, serta degradasi etika publik dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai sistem etika dan solusi normatif dalam menjawab tantangan tersebut. Melalui metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan persatuan sangat relevan dalam membangun budaya politik yang etis, rasional, dan demokratis. Strategi seperti penguatan literasi media dan integrasi pendidikan, etika Pancasila menjadi krusial untuk membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan tahan terhadap pengaruh disinformasi. Dengan demikian, revitalisasi nilai-nilai Pancasila di ranah komunikasi digital menjadi kunci untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia di tengah gempuran budaya *post-truth*.

ABSTRACT

The phenomenon of post-truth politics poses a serious challenge to the sustainability of democracy in Indonesia in the digital era. In this context, objective truth loses its influence in shaping public opinion, which is increasingly driven by emotion, personal belief, and often misleading narratives. The impact of post-truth culture includes the rise of disinformation, identity polarization, declining political rationality, and the erosion of public ethics and trust in democratic institutions. This journal aims to examine the role of Pancasila philosophy as an ethical system and normative solution in addressing these challenges. Using a descriptive qualitative method and a literature review approach, the study finds that the core values of Pancasila—such as honesty, justice, humanity, deliberation, and unity—are highly relevant in fostering an ethical, rational, and democratic political culture. Strategies such as strengthening media literacy and integrating Pancasila-based ethics education are crucial to developing citizens who are critical, responsible, and resilient to disinformation. Therefore, revitalizing Pancasila values within the realm of digital communication becomes key to preserving the integrity of Indonesia's democracy amid the onslaught of post-truth culture.

Copyright © 2026 (Ani Sulianti). All Right Reserved

Pendahuluan

Demokrasi tidak semata-mata dipahami sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, melainkan juga sebagai suatu struktur politik yang mengedepankan rasionalitas kolektif, keterbukaan akses informasi, serta perlindungan terhadap hak fundamental warga negara. Konsep demokrasi substansial mensyaratkan adanya lingkungan informasi yang kredibel, keterlibatan politik yang berdasarkan nalar, serta keberadaan institusi yang memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik. Dalam kerangka Indonesia, demokrasi pancasila berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan lokal dengan asas-asas universal seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, serta prinsip deliberatif dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

Demokrasi Indonesia dibangun diatas nilai-nilai luhur pancasila yang menjunjung tinggi prinsip kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa, pancasila memiliki peran penting sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam era digital saat ini, muncul tantangan baru berupa fenomena *post-truth*. Secara istilah, "post-truth" merujuk pada situasi di mana fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Suatu kondisi dimana fakta dan opini sulit dibedakan, dan kebenaran objektif seringkali dikalahkan oleh emosi serta kepercayaan pribadi. Fenomena ini mengancam kualitas praktik demokrasi di Indonesia.

Fenomena *post-truth* ditandai dengan meningkatnya arus disinformasi dan hoaks yang tersebar luas melalui media sosial. Informasi-informasi yang bersifat manipulatif tidak jarang dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini public dan memperkuat polarisasi politik, terutama pada masa-masa kontestasi elektoral. Menurut Evanalia (2022), jurnalisme media sosial di era *post-truth* dapat mempengaruhi demokrasi Indonesia melalui penyebaran informasi yang tidak akurat dan manipulatif, terutama selama periode pemilihan umum. Hal ini mengancam integritas demokrasi dan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Post-truth politics menjadi tantangan nyata di dalam demokrasi Indonesia khususnya terhadap kualitas demokrasi electoral. Demokrasi elektoral adalah bentuk demokrasi yang menekankan pada pemilihan umum (pemilu) sebagai mekanisme utama untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara bebas, adil, dan berkala. Polarisasi identitas, kampanye emosional, dan penyebaran narasi palsu di media sosial merupakan gejala yang mengganggu praktik politik saat ini (Susanto, 2020). Hal ini bukan hanya melemahkan rasionalitas publik, tetapi juga mengurangi partisipasi politik yang sehat dan berbasis pada diskusi rasional.

Pancasila sebagai dasar ideologis dan etika bangsa, filsafat pancasila memiliki peran penting dalam menjawab tantangan ini. Nilai-nilai seperti kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dapat dijadikan landasan normatif dalam membangun budaya politik yang etis dan demokratis (Kaelan, 2013). Dalam kapasitasnya sebagai sistem filsafat, pancasila tidak hanya merepresentasikan identitas bangsa, tetapi juga menjadi kerangka etis dalam merespons degradasi nilai di ranah politik kontemporer.

Pancasila menekankan nilai-nilai moral universal menghadapi tantangan serius di era *post-truth*, ketika emosi dan kepentingan pribadi lebih diutamakan dibandingkan fakta objektif. (Syuhada, 2017) menegaskan bahwa etika dan media sangat penting dalam menjaga kredibilitas informasi dan mencegah penyebaran disinformasi yang dapat merusak tatanan demokrasi. Disinformasi merupakan bentuk manipulasi informasi yang memiliki dampak destruktif bagi sistem demokrasi, khususnya di tengah era *post-truth*. Praktik ini menyesatkan masyarakat, memperdalam perpecahan sosial, dan meruntuhkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Upaya untuk mengatasi disinformasi tidak cukup hanya dengan strategi teknis seperti pemeriksaan fakta (*fact-checking*), tetapi juga perlu disertai pendekatan etis yang berpijak pada nilai-nilai pancasila sebagai landasan moral dan ideologis bangsa.

Literasi media berperan sebagai "benteng" kritis yang memungkinkan publik memilah informasi dengan cerdas. Menurut Batoebara et al. (2020), literasi media memberikan panduan bagi informasi individu dalam mengontrol dan menyeleksi informasi yang diterima, sehingga semakin tereduksi seseorang, semakin mampu membedakan realitas fakta dengan konstruksi media. Dalam

era seba digital, pengembangan kemampuan literasi informasi ini sangat penting untuk menekankan penyebaran hoaks dan disinformasi politik. Melalui literasi media yang baik, diharapkan masyarakat dapat kembali membangun kepercayaan publik dan memperkuat nilai-nilai demokrasi Indonesia di era digital.

Mengembangkan etika komunikasi digital yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sangat perlu dilakukan guna untuk menjawab tantangan *post-truth politics* yang ada dalam demokrasi Indonesia, perlu dikembangkan etika komunikasi digital yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. (Bustami et al, 2024) menekankan bahwa etika komunikasi digital harus diarahkan pada perlindungan hak masyarakat atas informasi yang benar dan mendorong tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Dalam hal ini, penerapan etika yang berakar pada nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam menjaga ketahanan demokrasi Indonesia di tengah gempuran budaya *post-truth*.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai peran Pancasila dalam merespons tantangan *post-truth politics* dalam demokrasi Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena mampu mengeksplorasi fenomena sosial secara menyeluruh melalui analisis terhadap data berupa teks atau dokumen, bukan angka (Sugiyono, 2017). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu teknik dengan cara menelaah berbagai literatur akademik yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku filsafat Pancasila, jurnal ilmiah tentang demokrasi, literasi media, serta artikel yang membahas disinformasi dan budaya *post-truth* (Sarwono, 2010). Literature dipilih secara purposive, berdasarkan keterkaitan isinya dengan fokus kajian. Data analisis secara konseptual dan filosofis, dengan menafsirkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, musyawarah, dan persatuan dalam kaitannya dengan tantangan *post-truth* di ruang publik digital. Langkah-langkah analisis dilakukan melalui identifikasi tema-tema utama, pengelompokan konsep berdasarkan sila-sila Pancasila, dan penafsiran etis terhadap relevansinya dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Pancasila Sebagai Sistem Etika Demokrasi

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya diartikan sebagai landasan normatif dalam bidang hukum dan ketatanegaraan, tetapi juga sebagai sistem nilai dan etika yang bersifat menyeluruh bagi kehidupan sosial-politik bangsa. Dalam pendekatan filsafat, Pancasila memuat dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila bukan hanya rangkaian sila yang dihafalkan secara formal, melainkan merupakan sumber nilai moral yang harus diinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam praktik demokrasi. Kaelan (2013) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat tidak terlepas dari tujuan luhur untuk membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran serta kemanusiaan.

Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip etis yang berkaitan erat dengan kehidupan demokratis. Sila pertama menekankan pentingnya pengakuan terhadap nilai transendental sebagai dasar moralitas, yang membentuk integritas dan kejujuran dalam

kehidupan publik. Sila kedua dan kelima menggarisbawahi pentingnya keadilan dan penghormatan demokratis. Sementara itu, sila keempat mendorong budaya dialog, musyawarah, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, yang menjadi pijakan moral yang komprehensif dalam membentuk demokrasi yang bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga bermuatan etis dan substantif.

Namun demikian, demokrasi seringkali dipersempit maknanya hanya pada pelaksanaan pemilu secara berkala. Padahal, esensi dari demokrasi sejati adalah ketika nilai-nilai moral, etika, dan keadilan terwujud dalam sistem yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab. Demokrasi menurut Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang ditunjukkan melalui keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan secara rasional, jujur, dan tanpa manipulasi informasi. Demokrasi seperti ini menuntut adanya transparansi, etika komunikasi, serta tanggung jawab sosial dari semua pelaku politik, baik pemerintah, partai politik, media, maupun masyarakat sipil (Susanto, 2020).

Akan tetapi dalam era kontemporer yang ditandai dengan munculnya fenomena *post-truth*, nilai-nilai etika tersebut mengalami tantangan serius. Istilah *post-truth* merujuk pada kondisi di mana fakta objektif menjadi kurang penting dalam membentuk opini publik, sementara emosi, kepercayaan pribadi, dan narasi manipulatif justru menjadi alat utama dalam mempengaruhi persepsi masyarakat (Mcintyre, 2018). Dalam situasi seperti ini, ruang publik dipenuhi oleh informasi yang tidak diverifikasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang memperkeruh rasionalitas politik dan mengancam integritas demokrasi. Politik menjadi arena pertarungan emosi dan opini, bukan lagi wacana yang didasarkan pada logika dan fakta. Fenomena ini semakin diperparah dengan peran media sosial yang kemungkinan penyebaran informasi tanpa kontrol etis yang memadai.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, nilai-nilai Pancasila menjadi sangat relevan untuk mengembalikan orientasi demokrasi pada koridor etika. Pancasila sebagai sistem etika politik mampu memberikan arah normatif dengan membangun kesadaran politik yang sehat dan bertanggung jawab. Nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan fondasi dalam praktik komunikasi politik di era digital. Seperti ditegaskan oleh Syuhada (2017), pentingnya membangun etika media dan komunikasi berbasis moralitas nasional menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari manipulasi informasi dan disinformasi yang merusak tatanan demokrasi.

Oleh karena itu, penguatan filsafat Pancasila sebagai sistem etika demokrasi tidak hanya penting dalam konteks teoritis, tetapi juga mendesak dalam implementasi praktis. Pendidikan politik, literasi media, dan etika komunikasi perlu diarahkan untuk membangun budaya demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika masyarakat memiliki kesadaran kritis dan etika politik yang berakar pada nilai-nilai lokal dan nasional, maka demokrasi Indonesia akan mampu bertahan dan berkembang secara sehat, meskipun di tengah ancaman *post-truth* yang semakin kompleks.

2. Dampak Post-truth politics terhadap Demokrasi Indonesia

Secara umum, *Post-truth Politics* menggambarkan pada kondisi di mana “fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini public dinding emosi dan keyakinan pribadi”. Fenomena ini melanda banyak negara dan turut mengurus nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, *post-truth* tercermin dari maraknya hoax dan media informasi yang memanfaatkan sentimen identitas untuk menenangkan dukungan politik. Tersebut menciptakan tantangan serius bagi kohesi sosial, kepercayaan public terhadap lembaga-lembaga demokrasi, kualitas ekosistem informasi, seta kualitas partisipasi politik warga. Berikut beberapa dampak *post-truth* dalam empat dimensi utama yaitu, sosial, institusi politik, media (informasi), dan partisipasi publik:

a. Dampak Sosial: Pluralisme dan Perpecahan Identitas.

Globalisasi identitas: Disinformasi berbasis agama, ras, atau suku semakin tajam di Indonesia. Contoh nyata adalah Pilkada DKI 2017, dimana kampanye hoaks dan narasi agama memicu polarisasi tajam masyarakat. Suharyanto (2019) bahkan menegaskan bahwa misinformasi pada pilkada DKI menumbuhkan jurang pemisah berdasarkan identitas agama.

Ketegangan komunal: Hoaks yang beredar kerap memicu ketegangan dan konflik horizontal. Sebagai contoh, kerusuhan Papua Agustus 2019 dipicu oleh beredarnya hoax jumlah korban meninggal, sehingga pemerintah sempat membatasi akses internet untuk meredakan situasi. Insiden ini menunjukkan bagaimana media informasi di media sosial dapat menimbulkan kecemasan kolektif, mengancam stabilitas sosial, bahkan mengarah pada aksi kekerasan.

Erosi kohesi sosial: Rianissa (2024) mencatat bahwa disinformasi sengaja digunakan untuk “memobilisasi ketakutan masyarakat terhadap kelompok minoritas atau lawan politik”, yang “menciptakan ketegangan sosial” dan menurunkan kepercayaan public terhadap proses politik yang seharusnya inklusif dan transparan. Disinformasi semacam ini merusak semangat toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga masyarakat terbelah kedalam “kebenaran vs kebenaran anda” dengan menggantikan dialog dengan curiga dan kebencian antar-kelompok.

b. Dampak pada Institusi Politik: Kepercayaan Menurun

Kepercayaan terhadap pemilu: Hoax dan ujaran kebencian pada masa kampanye pemilu atau pemilu telah menurunkan kepercayaan publik pada proses pemilihan umum. Misalnya, kominfo melaporkan lonjakan ribuan hoaks menjelang pilpres 2019 yang menargetkan kandidat tertentu untuk mendiskreditkan mereka. Gustrinanda dan Tanjung (2023) menyatakan bahwa penyebaran berita bohong tersebut mempengaruhi persepsi warga terhadap partai politik dan capres, serta menumbuhkan keraguan atas hasil pemilu. Situasi semacam ini mengikis legitimasi lembaga penyelenggara (KPU) dan prinsip “pemilu jujur dan adil” yang dijamin konstitusi.

Kepercayaan terhadap partai politik dan elit: Post-truth menimbulkan skeptisisme terhadap partai politik dan elit pemerintahan. Kampanye negatif yang “memperkuat stereotip dan prasangka terhadap suatu kelompok” membekas pada citra partai atau figuranya. Bukti empiris menunjukkan jika informasi palsu diarahkan pada calon partai atau partai tertentu, public cenderung kehilangan kepercayaan kepada mereka. Rianissa (2024) menyimpulkan bahwa disinformasi secara keseluruhan “melemahkan fondasi demokrasi dengan mengikis

kepercayaan public terhadap institusi-institusi politik”. Hasilnya, demokrasi diragukan kapabilitasnya oleh warga, yang berfikir proses politik tidak lagi adil atau kredibel.

Kepercayaan terhadap lembaga negara: Lembaga negara lainnya (presiden, DPR, lembaga penegak hukum) juga terkena dampak negatif. Saat hoaks dan narasi populis meraja, publik cenderung melihat setiap kebijakan melalui kacamata ketidakpercayaan. Riannissa (2024) mencatat bahwa disinformasi membuat warga “sering diarahkan membuat keputusan yang tidak rasional atau berdasarkan informasi yang tidak benar”, artinya keyakinan warga terhadap kinerja lembaga negara mudah terpengaruh oleh penyebaran informasi tak berdasar. Menurunkan kepercayaan ini memicu apatisme politik: beberapa studi (Lumintang 2022) memperingatkan bahwa krisis kepercayaan dapat mengarah pada penurunan partisipasi warga yang secara langsung berpengaruh pada legitimasi lembaga-lembaga demokrasi.

c. Dampak pada Media dan Ekosistem Informasi: Hoaks dan Partisanship

Penyebaran hoax melalui media sosial: Media sosial menjadi saluran utama disinformasi di Indonesia. Sebagai ilustrasi, selama Pilpres 2019 pemerintah memblokir lebih dari 2.000 akun media sosial dan web karena penyebaran hoaks. Fitur komunikasi instan (misalnya WhatsApp) bahkan dimanfaatkan untuk penyebaran rumor viral-sebelum kerusuhan 22 Mei 2019. WhatsApp menutup puluhan ribu grub karena konten menyesatkan. Volume informasi di media sosial juga sangat besar (Kominfo mencatat terjadinya terabyte data hoaks per hari pada 2018), membuat masyarakat Indonesia menjadi bagian dari “tsunami post-truth” global. Tanpa literasi yang memadai, pengguna mudah terjebak dalam lingkaran informasi yang bias dan tidak terverifikasi.

Efek algoritma dan echo chamber: Algoritma platform media sosial (Facebook, YouTube, Twitter dll.) cenderung memprioritaskan konten yang menarik perhatian pengguna, yaitu konten sensasional dan emosional. Akibatnya, berita-berita hoaks yang penuh sentiment mudah tersebar luas dan memperkuat bias penonton. Garbani (2021) bahkan menyebut bahwa media sosial membentuk ruang gema (echo chamber) di mana pengguna semakin tenggelam dalam informasi yang sesuai pandangan mereka. Filter bubble seperti ini mempersulit paparan pada sudut pandang berbeda, meningkatkan prestasi serta mendistorsi persepsi kebenaran.

Media partisan: Selain media sosial, media arus utama dan online di Indonesia juga menunjukkan trend keberpihakan politik. Banyak outlet cenderung menampilkan narasi yang sudah sepihak sesuai afiliasi politik atau ideologi tertentu. Dalam konteks post-truth, media partisan ini sering menyebarkan atau membiarkan penyebaran hoaks dan opini tanpa cek fakta, sehingga menambah kebingungan publik. Sementara itu, media tidak partisan (misalnya media independen/fact-checker) masih terbatas jangkauannya. Akibatnya, ekosistem informasi Indonesia menjadi rentan: banyak warga sulit membedakan media yang kredibel, sehingga narasi palsu mudah dipertahankan sebagai “kebenaran alternatif” di kelompok pendukung tertentu.

d. Dampak pada Partisipasi Publik: Debat Politik dan Rasionalitas Terganggu

Kualitas debat publik menurun: Disinformasi memiskinkan kualitas diskusi politik. Penelitian Suharyanto (2019) menemukan bahwa hoaks dan narasi manipulatif menghambat dialog antar-kelompok politik, mendalamkan pembelahan ideologis, dan

menciptakan suasana politik yang lebih konfrontatif. Akibatnya, perdebatan publik cenderung hitam-putih dan emosional, bukan rasional dan argumentatif. Karena “opsi dan keputusan dibuat bukan berdasarkan fakta akurat” (Hadiz, 2016), banyak perdebatan produktif terhenti oleh bantahan emosional. Diskusi politik pun lebih sering diwarnai ujaran kebencian dan hoax, yang jauh dari semangat deliberatif demokrasi.

Keterlibatan warga dan apatisisme: Tingginya kadar informasi keliru membuat sebagian warga kehilangan motivasi atau kepercayaan untuk terlibat aktif. Rianissa (2024) menggarisbawahi bahwa ketika disinformasi merajalela, masyarakat dapat terseret ke apatisisme politik dan menurunkan partisipasi dalam pemilu maupun proses demokrasi lainnya. Lumintang (2022) berpendapat bahwa krisis kepercayaan akibat post-truth dapat menghambat konsensus politik, karena warga enggan berpartisipasi jika merasa informasi sudah tidak dapat diandalkan. Lumintang (2022) berpendapat bahwa krisis kepercayaan akibat post-truth dapat menghambat konsensus politik, karena warga enggan berpartisipasi jika merasa informasi sudah tidak dapat diandalkan. Kondisi ini berbahaya karena demokrasi membutuhkan partisipasi warga yang berdasarkan pemahaman yang akurat.

Rasionalitas politik terganggu: Sebagai konsekuensi, rasionalitas warga dalam menentukan pilihan politik juga menurun. Banyak warga memilih berdasar narasi emosional—baik ketakutan maupun amarah—daripada penilaian obyektif. Misalnya, strategi kampanye hoaks yang memanfaatkan isu kriminalitas atau ekonomi (Pilpres 2019) terbukti mempengaruhi opini pemilih dan menyebabkan keputusan yang salah. Disinformasi yang terus-menerus memperkuat stereotip dan kebencian pada kelompok tertentu akan semakin mengubur argumen rasional di masyarakat. Akibatnya, warga lebih terjebak pada “post-truth” sentimen, sehingga kemampuan kritis dan rasional dalam politik menurun (Fatmawati, 2020).

Secara keseluruhan, era post-truth telah menimbulkan berbagai dampak destruktif bagi demokrasi Indonesia. Secara sosial, post-truth memicu polarisasi identitas dan fragmentasi masyarakat. Pada tingkat institusi politik, hoaks dan disinformasi mengikis legitimasi pemilu, partai, dan lembaga negara. Ekosistem informasi penuh konten menyesatkan, sementara media partisan memperkuat bias, mempersulit warga mendapatkan informasi akurat. Akhirnya, partisipasi publik terancam: kualitas debat publik memburuk, warga cenderung apatis atau emosional, dan rasionalitas politik terkikis. Untuk itu, literasi media kritis dan upaya kolektif sangat diperlukan agar demokrasi Indonesia dapat bertahan dan tetap berbasis fakta.

3. Relevansi Pancasila dalam Merespons Post-truth Politics

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya mengandung nilai-nilai normatif yang bersifat konstitusional, tetapi juga memuat prinsip-prinsip etis dan ideologis yang dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk fenomena *post-truth politics*. Dalam era di mana kebenaran sering kali dikaburkan oleh emosi dan opini personal, Pancasila memiliki relevansi yang mendalam sebagai pedoman untuk mengarahkan kembali perilaku politik dan kehidupan sosial masyarakat kepada orientasi yang berbasis pada keadaban, kebenaran, dan keadilan sosial (Kaelan, 2013). Berikut beberapa peran penting antara lain:

- a. Menegakkan Etika Politik dan Moralitas Publik

Pancasila menempatkan nilai-nilai etika sebagai fondasi dalam praktik politik. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” mengandung prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral. Sementara sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai keadilan universal. Dalam konteks *post-truth*, di mana manipulasi informasi menjadi strategi dominan dalam membentuk opini publik, nilai-nilai ini menjadi sangat penting. Politik yang berdasarkan Pancasila harus menjunjung transparansi, kejujuran, serta menolak segala bentuk kebohongan dan penyebaran hoaks. Sebagaimana ditegaskan oleh Syuhada (2017), etika politik menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas demokrasi dan mencegah degradasi kepercayaan publik.

b. Memperkuat Solidaritas dan Kohesi Sosial

Salah satu dampak utama dari *post-truth politics* adalah meningkatnya polarisasi dan fragmentasi sosial. Informasi yang bersifat provokatif dan sektarian seringkali digunakan untuk mengeksploitasi identitas tertentu demi kepentingan politik jangka pendek. Hal ini berpotensi merusak persatuan bangsa. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” hadir sebagai pilar integratif yang menolak segala bentuk politik identitas yang memecah belah masyarakat. Dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan semangat kolektivitas, Pancasila memberikan fondasi ideologis untuk membangun solidaritas sosial yang kuat, yang sangat dibutuhkan di tengah disrupsi digital dan ancaman disinformasi. Menurut Bustami et al. (2024), penerapan nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi politik sangat efektif dalam membendung retorika politik yang memecah-belah masyarakat.

c. Mendorong Literasi Kritis dan Kesadaran Rasional

Berbeda dari ideologi yang bersifat dogmatis, Pancasila bersifat terbuka dan progresif. Ia mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, reflektif, dan rasional dalam merespons persoalan bangsa. Dalam era *post-truth*, kesadaran kritis ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” menekankan pentingnya diskusi yang bijak dan rasional dalam pengambilan keputusan publik. Prinsip ini sejalan dengan upaya memperkuat demokrasi deliberatif di mana wacana dibangun atas dasar argumentasi logis, bukan propaganda dan agitasi emosional. Sebagaimana disampaikan oleh McIntyre (2018), literasi informasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan senjata utama melawan budaya *post-truth*.

Pancasila, dengan kekayaan nilai-nilainya, memiliki relevansi yang kuat dan aplikatif dalam merespons berbagai tantangan era *post-truth*. Melalui penguatan etika politik, pemulihan solidaritas sosial, dan pembentukan kesadaran kritis warga negara, Pancasila dapat menjadi panduan ideologis dan moral dalam membangun sistem demokrasi yang sehat, tangguh, dan berkeadaban. Maka dari itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam pendidikan politik, kebijakan komunikasi publik, serta praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

4. Literasi Media dan Pendidikan Etika Pancasila sebagai Strategi untuk menghadapi tantangan post-truth

Era post-truth merupakan masa ketika emosi dan opini subjektif lebih berpengaruh dibandingkan dengan kebenaran faktual dalam membentuk persepsi publik. Gejala ini terlihat jelas melalui meningkatnya penyebaran informasi palsu, seperti hoaks dan disinformasi di berbagai platform digital, khususnya media sosial. Di Indonesia, hal ini menimbulkan potensi perpecahan sosial, melemahkan demokrasi, serta mengancam nilai-nilai ideologis bangsa. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah terbelah oleh narasi emosional yang tidak berpijak pada rasionalitas.

Literasi media sebagai perisai informasi literasi media memainkan peran penting sebagai alat pertahanan masyarakat dalam menghadapi derasnya arus informasi digital. Kemampuan ini tidak terbatas pada akses terhadap informasi, tetapi meliputi kecakapan dalam memilah, menelaah, dan menyebarkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki literasi media akan mampu mengidentifikasi perbedaan antara fakta dan opini, memahami konteks narasi yang disampaikan, dan mengenali berbagai bentuk manipulasi seperti judul provokatif (clickbait), bias media, dan framing. Dengan literasi media yang baik, masyarakat menjadi lebih tahan terhadap pengaruh negatif dari informasi menyesatkan.

Etika pancasila sebagai penuntun moral sementara itu, pendidikan etika berbasis Pancasila berperan sebagai landasan nilai dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Melalui penanaman nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan keadilan, pendidikan pancasila menjadi relevan untuk melawan budaya informasi palsu dan manipulative. Jika literasi media membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis, maka etika pancasila membentuk kesadaran moral dalam menyikapi dan merespons informasi. Dengan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, pendidikan ini menumbuhkan kemampuan untuk bersikap bijaksana dan menghadapi keragaman informasi di ruang politik.

Menghadapi kompleksitas era *post-truth* menuntut pendekatan terpadu yang menggabungkan literasi media dengan pendidikan etika pancasila. Literasi tanpa nilai moral dapat menghasilkan individu yang pandai secara teknis namun rentan menyalahgunakan informasi. Sebaliknya, nilai moral tanpa kemampuan analitis membuat masyarakat mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, perlu integrasi kedua aspek ini dalam sistem pendidikan, baik formal maupun informal. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan media menjadi krusial untuk membentuk generasi yang tidak hanya kritis, tetapi juga memiliki karakter luhur dalam penggunaan informasi.

Penerapan strategi ini perlu didukung oleh kebijakan pendidikan yang adaptif, seperti pengembangan kurikulum yang memadukan literasi media dengan pembelajaran pancasila. Guru harus mendapatkan pelatihan khusus dan materi ajar perlu dikembangkan melalui pendekatan berbasis masalah dan proyek (project-based Learning). Di luar sekolah, masyarakat juga harus dilibatkan dalam edukasi publik, diskusi warga, dan program literasi yang melibatkan tokoh agama atau budaya. Kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan etis.

Strategi nasional di tengah arus informasi yang cepat dan sering kali menyesatkan, Indonesia membutuhkan strategi nasional yang berakar pada penguatan karakter dan rasionalitas. Literasi media dan pendidikan etika pancasila harus diposisikan sebagai

kebutuhan strategis bukan sekedar pelengkap kurikulum. Keduanya berkontribusi dalam menjaga nalar publik, memperkuat jati diri bangsa, serta menjamin keberlangsungan demokrasi yang sehat. Dengan masyarakat yang cerdas secara kritis dan tangguh secara moral, mampu menghadapi tantangan global di era *post-truth* dengan lebih siap dan martabat.

Dalam menghadapi tantangan politik *post-truth* yang mengancam rasionalitas publik dan kohesi sosial, dibutuhkan pendekatan yang sistematis dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Salah satu strategi paling fundamental untuk membendung dampak destruktif dari budaya *post-truth* adalah melalui penguatan literasi media dan pendidikan etika berbasis Pancasila. Kedua aspek ini berperan sebagai pilar utama dalam membentuk kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, dan integritas informasi dalam kehidupan publik.

1. Literasi Media sebagai Instrumen Perlindungan Demokrasi

Literasi media adalah kemampuan individu untuk secara aktif mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam berbagai bentuk media. Dalam konteks *post-truth*, literasi media menjadi alat vital untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan, seperti hoaks, disinformation, dan propaganda digital. Menurut Livingstone (2004), literasi media tidak hanya melibatkan pemahaman teknis atas media, tetapi juga kapasitas reflektif untuk menilai motivasi di balik pesan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Masyarakat Indonesia, sebagai pengguna aktif media sosial, sangat rentan terhadap arus informasi yang tidak tervalidasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi media harus menjadi prioritas dalam kebijakan publik dan program pendidikan. Masyarakat perlu diajarkan cara membedakan fakta dan opini, mengenali teknik manipulasi informasi, serta mengidentifikasi kredibilitas sumber berita. Literasi media yang kuat akan memperkuat posisi warga negara sebagai subjek aktif dalam demokrasi, bukan sekadar objek pasif dari pengaruh informasi yang tidak benar (Wardle & Derakhshan, 2017).

2. Pendidikan Etika Pancasila sebagai Landasan Moral Digital

Selain kemampuan teknis, masyarakat juga perlu dibekali dengan landasan etis dalam menghadapi dinamika digital. Di sinilah pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan etika, baik di jalur formal (sekolah dan universitas) maupun non formal (komunitas, organisasi sosial). Pancasila, sebagai sistem etika kebangsaan, menyediakan panduan moral yang relevan dalam membentuk karakter warga digital yang bertanggung jawab, adil, dan beradab.

Pendidikan etika Pancasila harus diaktualisasikan dalam konteks digital dengan menekankan nilai-nilai seperti kejujuran (sila 1), kemanusiaan (sila 2), solidaritas (sila 3), dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah (sila 4). Dalam praktiknya, nilai-nilai ini dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta kurikulum literasi digital di semua jenjang pendidikan. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya cerdas dalam memilah informasi, tetapi juga memiliki integritas moral dalam menyebarkan dan menerima informasi (Kaelan, 2013).

3. Pendidikan Etika Pancasila sebagai Landasan Moral Digital

Selain kemampuan teknis, masyarakat juga perlu dibekali dengan landasan etis dalam menghadapi dinamika digital. Di sinilah pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila

dalam pendidikan etika, baik di jalur formal (sekolah dan universitas) maupun nonformal (komunitas, organisasi sosial). Pancasila, sebagai sistem etika kebangsaan, menyediakan panduan moral yang relevan dalam membentuk karakter warga digital yang bertanggung jawab, adil, dan beradab.

Pendidikan etika Pancasila harus diaktualisasikan dalam konteks digital dengan menekankan nilai-nilai seperti kejujuran (sila 1), kemanusiaan (sila 2), solidaritas (sila 3), dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah (sila 4). Dalam praktiknya, nilai-nilai ini dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta kurikulum literasi digital di semua jenjang pendidikan. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya cerdas dalam memilah informasi, tetapi juga memiliki integritas moral dalam menyebarkan dan menerima informasi (Kaelan, 2013).

Strategi menghadapi post-truth politics tidak cukup hanya dengan regulasi atau penegakan hukum. Solusi yang lebih berkelanjutan terletak pada pembangunan kapasitas individu dan kolektif melalui literasi media dan pendidikan etika Pancasila. Literasi media akan membekali masyarakat dengan keterampilan kritis dalam memilah informasi, sementara pendidikan etika Pancasila akan memperkuat fondasi moral dan karakter warga negara. Dengan menggabungkan keduanya, Indonesia dapat membangun ketahanan demokrasi yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan keadaban publik.

Simpulan

Fenomena *Post-Truth Politics* yang berkembang pesat di era digital telah menimbulkan tantangan serius terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Ketika opini emosional dan keyakinan pribadi lebih memengaruhi opini publik dibandingkan fakta objektif, maka ruang demokrasi mengalami erosi. Gejala seperti penyebaran disinformasi, meningkatnya polarisasi identitas, serta penurunan kepercayaan terhadap institusi-institusi negara mencerminkan kemunduran kualitas partisipasi warga dalam proses politik yang seharusnya rasional dan etis.

Pancasila memiliki peran strategis di tengah krisis ini, sebagai fondasi nilai dan sistem etika yang mampu menuntun arah demokrasi Indonesia ke jalur yang lebih berkeadaban. Nilai-nilai seperti, kejujuran, keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan persatuan yang terkandung dalam pancasila menjadi sangat relevan untuk diaktualisasikan sebagai pendoman moral dalam merespons dinamika informasi yang semakin kompleks dan tidak menuntut.

Merespons tantangan *Post-truth* diperlukan pendekatan yang integratif, yaitu melalui penguatan literasi media dan internalisasi pendidikan etika pancasila. Literasi media berperan penting dalam membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis terhadap konten digital, sedangkan pendidikan etika berbasis pancasila menanamkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi di ruang buplik. Kombinasi keduanya akan membentuk warga negara yang tidak hanya cakap dalam mengelola informasi, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menjaga kebenaran dan nilai-nilai demokrasi.

revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan literasi media dan pendidikan etika menjadi strategi kunci dalam memperkuat ketahanan demokrasi Indonesia. Dalam menghadapi era post-truth yang ditandai oleh disrupsi informasi dan degradasi rasionalitas publik, Pancasila tidak hanya penting sebagai simbol kebangsaan, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam membangun demokrasi yang adil, rasional, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Aminudin, R. (2022). Media sosial dan politisasi post-truth di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Politik*, 14(1), 122–136. <https://doi.org/10.31295/komunikasi-politik.2022.14.122-136>
- Amilin, A. (2020). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Lembannas RI*, 7(3), 5–11. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i3.73>
- Amir, R., Putri, A. R., Zaini, S. N., & Batubara, T. (2025). Pendidikan Pancasila dan Ketahanan Informasi di Era Post-Truth. *Polyscopia*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1559>
- Alimi, M. Y. (2019). Theorizing internet, religion and post truth: An article review. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(2), 207–222. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i2.21860>
- Bakir, V., & McStay, A. (2017). Fake news and the economy of emotion: Problems, causes, and solutions. *Digital Journalism*, 5(3), 276–292. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1345645>
- Batoebara, M. U., Suyani, E., & Nuraflah, C. A. (2020). Literasi Media dalam Menanggulangi Berita Hoaks (Studi Pada Siswa SMKN 5 Medan). *Jurnal Warta Edisi* 63, 14, 34.
- Bustami, A. R., Siregar, A. R., & Harahap, M. S. (2024). Nasution Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5(1), 39–53.
- Eberl, J. M., & Egelhofer, J. L. (2022). Post-truth. *Elgar Encyclopedia of Technology and Politics*, 46(2018), 253–257. <https://doi.org/10.4337/9781800374263.post.truth>
- Eko Suharyanto, C. (2019). Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review Analysis of Hoax News on The Post-Truth Era: An Review. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 10(2), 37–49.
- Evanalia, S. (2022). The Role of Social Media Journalism in Realizing Indonesian Democracy in the Post Truth Era. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 32–43.
- Evanalia, S. (2022). Peran jurnalisme media sosial dalam mewujudkan demokrasi Indonesia di era post truth. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 32–43.
- Fatmawati, E. (2020). Tantangan literasi informasi bagi generasi muda pada era post-truth. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 28(2), 57–66.
- Faturahmi, L. (2020). Dampak post-truth terhadap partisipasi politik masyarakat Indonesia dalam Pemilu 2019. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 7(2), 35–49. <https://doi.org/10.31002/ipemd.2020.07.35-49>
- Garbani, M. (2021). Algoritma dan ruang gema: Bagaimana media sosial membentuk pandangan politik pengguna. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 10(1), 44–55.
- Giovardhi Veva Revian. (2020). Unikom_Revian Veva Giovardhi_Bab Iii. *Jurnal Article*, 1, 2–57.
- Glasser, T. L. (2016). *Politics, media, and modern democracy: Post-truth and the new normal*. Cambridge University Press.
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2021). *Demokrasi di era post truth*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gustrinanda, R., & Tanjung, T. (2023). BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu di Indonesia. *Tabun*, 2(1), 158–163.

<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>

- Inglehart, R., & Norris, P. (2016). *Cultural backlash and the rise of populism: The post-truth phenomenon in Western democracies*. Cambridge University Press.
- Keyes, R. (2004). *The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life*. St. Martin's Press.
- Khoir, Q. (2025). Pancasila Sebagai Paradigma Pendidikan Karakter di Era Post-Truth: Mengatasi Kontradiksi Informasi Hoaks dan Nilai Kebenaran. *AJMIE: Albikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 5(2), 170–181. <https://doi.org/10.32478/088m0h05>
- Kurniawan, D. (2018). Disinformasi dan politik identitas di Indonesia: Tinjauan terhadap media sosial. *Jurnal Politik dan Hukum*, 11(2), 114–128
- Lengga Wangge, G. L., & Wijanarko, R. (2023). Politik Identitas Era Post-Truth di Indonesia dalam Perspektif Language Games Ludwig Wittgenstein. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 152–161. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.53628>
- Putro, W. D. (2020). Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth. In *Sanabil*.
- Ramdani, S. (2022). Contoh Bab 3 Metlit Studi Pustaka 1. *Repository STEI*, 6–9.
- Rianto, P. (2020). When lying becomes an ordinary thing: Ethics in the post-truth era. *Jurna Komunikasi Indonesia*, 9(1), Article 7. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.11986>
- Rianissa, S. N. (2025). Disinformasi di era post-truth: Ancaman terhadap demokrasi dan mobilitas global. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.659>
- Salma Nabila Rianissa. (2024). Disinformasi di Era Post-Truth: Ancaman terhadap Demokrasi dan Mobilitas Global. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.659>
- Sulianri, Ani, dkk. 2020. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Moral melalui Pembelajaran Demokrasi. Vol.5 No. 1, 66-76. JED: Jurnal Etika Demokrasi.
- Susanto, A. (2020). Politik Post-Truth dan Tantangannya terhadap Demokrasi Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(2), 115–130.
- Syuhada, K. D. (2018). Etika Media di Era “Post-Truth.” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8789>
- Tomsa, D. (2020). Public opinion polling and post-truth politics in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 1–27. <https://doi.org/10.1355/cs42-1a>
- Turpyn, J. M. F., & Nasucha, M. (2020). Democracy in post-truth era: The public sphere practice in Indonesian presidential election, 2019. In *Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)* (Vol. 397). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.059>
- UNESCO. (2018). *Jurnalisme, “Berita palsu”, & disinformasi* (E. Wendratama, Trans.). Universitas Gadjah Mada.